2024-2026

RENSTRA

REVISI

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas berkat dan karunia Allah SWT, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024–2026. Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024–2026 ini mengupas tentang gambaran pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB selama tiga tahun. Dengan terbitnya Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB ini, diharapkan dapat menjadi rujukan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, agar setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB memahami dengan benar beban tugasnya masing masing sehingga dapat menjalankan fungsi organisasi secara keseluruhan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus, semoga Renstra ini dapat bermanfaat.

Mataram, 2024
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

DRS. H. SURYA BAHARI, MMPd
NIP. 19680219 198811 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB 7
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 7
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 7
2.1.2 Struktur Organisasi 8
2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi 8
2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi NTB 17
2.2.1 Sumber Daya Manusia 18
2.2.2 Sumber Daya Modal/Anggaran 20
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD 30
BAB III
PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU STRATEGIS 33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB 33
3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 35
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota 38
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 36
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 39

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN 41
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB 41
4.2. Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Dengan Tujuan Dan Sasaran RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 41
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 52
BAB VI
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN 55
6.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan berdasarkan permendagri 90/2019 55
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 74
BAB VIII
PENUTUP 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Hal**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB……..... 8

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
Tabel 2.1	Jumlah PNS Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2023 Berdasarkan Eselon……..	19
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2023 Berdasarkan Pangkat/Golongan……	19
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan…….....……...	19
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Prov. NTB……...	20
Tabel 2.5	Kondisi Aset Tetap Tahun 2022 dan 2023……..	21
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023……..	22
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023……...	23
Tabel 3.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026……	34
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB ……..	40
Tabel 4.2	Cascading Kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran sampai dengan Outcome dan Output Sekretariat DPRD NTB…….……..	42
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ……...	52
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 …….	58
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD ……...	75

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai Instrumen untuk mengukur kinerja dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan Stretegis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi berbagai persoalan yag dihadapi. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut dan Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengukuran kinerja. RENSTRA adalah instrument awal atau landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Oleh karenanya, RENSTRA harus berisikan informasi berupa Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Target, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta menitikberatkan pada hasil (outcome).

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 258 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selain melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, daerah juga diharuskan untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional. Berdasarkan Inmmendagri Nomor 52 Tahun 2022 pada Diktum I, bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 serta memerintahkan kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Upaya mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen

Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB perlu dilakukan revisi untuk mensinergikan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Renstra Revisi Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 berpedoman pada Hasil Review RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026. RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sehingga perlu dilakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Renstra Revisi Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Hasil Review RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2025-2045 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025-2045. Renstra Revisi Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Mengacu pada hal tersebut maka disusun Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN Tahun 2025-2045 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 590).

14. Inmendagri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005- 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB.
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

26. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Strategis (Renstra) Revisi ini disusun sebagai pedoman perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB untuk 3 (tiga) tahun (2024-2026) yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

2. Tujuan

   a. Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Periode 2024-2026.

   b. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB setiap tahun selama periode Renstra.

   c. Menjadi tolak ukur dalam pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

   d. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas Latar Belakang Penyusunan Renstra, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra, dan Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah(PD), dan Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, Kelompok Sasaran Layanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Menyajikan informasi tentang Permasalahan Perangkat Daerah (PD), Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026.

Penentuan Isu Strategis terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menyajikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB serta hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan Sasaran RPD Provinsi NTB Tahun 2024- 2026, serta Cascading Kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran sampai dengan Outcome dan Output.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi uraian tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagunya (nomenklatur mengacu PMDN 90/2019 berikut pemutakhirannya).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah (PD) yang akan dicapai Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam periode 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024–2026, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah (PD).

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 9 ayat 4, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah paragraf 2 pasal 9 ayat 5 menyatakan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi dan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Sekretariat DPRD Provinsi NTB Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB (SETWAN) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

SETWAN mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SETWAN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

a. Sekretariat DPRD,
b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,
c. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
   1) Sub Bagian Tata Usaha,
d. Bagian Keuangan, dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat

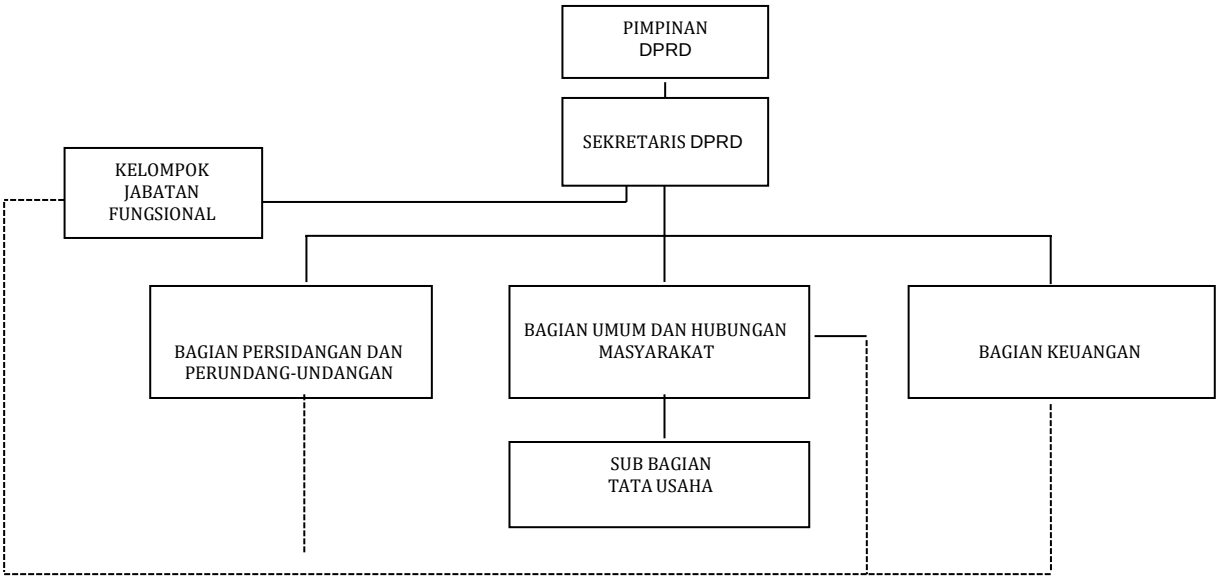

Sumber : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023

2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi

I. SEKRETARIS

- **Rincian Tugas**

a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan, Rapat dan Risalah serta Keuangan;
b. Merumuskan bahan kebijakan dan menyalenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan DPRD;
c. Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi kegiatan Kesekretariatan DPRD;

d. Merumuskan bahan kebijakan dan menyediakan, serta mengoordinasi kelompok pakar atau tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan rencana kegiatan alat kelengkapan DPRD;
f. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan asset/barang milik daerah pada Sekretariat DPRD;
g. Merumuskan bahan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat-Rapat, Kunjungan Kerja, Konsultasi, Workshop, Reses, Hearing, dan kegiatan DPRD lainnya;
h. Merumuskan bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,monitoring dan evaluasi;
i. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Sekretariat DPRD;
j. Merumuskan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Sekretariat DPRD;
k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➢ **Rincian Fungsi**

a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/ materi kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
b. Perumusan dan penyelenggaraan Rencana/Program kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
c. Perumusan dan Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, serta Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
d. Perumusan dan Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
e. Perumusan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
f. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

II. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- **Rincian Tugas**

a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Rapat dan Risalah, Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi, serta Perundang-undangan Dokumentasi dan Perpustakaan;
b. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
c. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, serta penyelengaraan persidangan;
d. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
e. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM) dan risalah rapat, serta mengoordinasikan pembahasan Raperda;
f. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
g. Menyusun bahan kebijakan dan mengoordinasikan layanan dan penyediaan bahan rapat, pesidangan dan penyusunan risalah;
h. Menyusun bahan kebijakan dan mengoordinasikan layanan rapat kegiatan alat kelengkapan Dewan dan kegiatan fraksi DPRD;
i. Menyusun bahan kebijakan dan mengadministrasikan kegiatan layanan Perundang-undangan, dokumentasi dan perpustakaan;
j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
k. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulanRKA/DPA kegiatan Persidangan dan Perundangundangan;
l. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan;
m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

- **Rincian Fungsi**

a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Persidangan dan Perundang-undangan;
b. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Persidangan dan Perundang-undangan;
c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

III. BAGIAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

- **Rincian Tugas**

a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Urusan Dalam dan Pengamanan Dalam, Humas, Protokol dan Perjalanan, serta Tata Usaha;
b. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD, pengelolaan asset/ Barang Milik Daerah;
c. Menyusun bahan kebijakan dan mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD, administrasi keanggotaan DPRD; serta tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
d. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, serta menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
e. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
f. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
g. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis lingkup tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
h. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;

i. Menyusun bahan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
k. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulanRKA/DPA kegiatan Umum dan Humas;
l. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum dan Humas;
m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

- **Rincian Fungsi**

a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Umum dan Humas;
b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Umum dan Humas;
c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Tata Usaha

- **Rincian Tugas**

a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Tata Usaha;
b. Menyiapkan bahan kebijakan dan menyusun rencana/ program kebijakan teknis Tata Usaha;
c. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan suratmenyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD, melaksanakan kearsipan, menyusun

administrasi kepegawaian, serta menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;

d. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
e. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan administrasi dan kearsipan biodata pimpinan dan anggota DPRD;
f. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai;
g. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kearsipan, serta penggandaan,pendistribusian naskah dinas;
h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi;
i. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Tata Usaha;
j. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Tata Usaha;
k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

IV. BAGIAN KEUANGAN

- **Rincian Tugas**

a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan, Tata Usaha Keuangan serta Verifikasi dan Pembukuan;
b. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
c. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP, Raperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD, serta laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

d. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah, serta terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
e. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, serta pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
f. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan,penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, serta persetujuan kerjasama daerah;
g. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
h. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
i. Menyusun bahan kebijakan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
k. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Sekretariat DPRD;
l. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Sekretariat DPRD;
m. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan;
n. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Keuangan;

o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➢ **Rincian Fungsi**

a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Keuangan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Keuangan;
c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2023 disebutkan bahwa Penetapan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugasmemberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatanpimpinan tinggi pratama sesuai dengan keahlian dan ketrampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi kepada Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Adapun tugas dan fungsi jabatan fungsional yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai berikut:

Jenis-Jenis Fungsional pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

1. Fungsional Analis Kebijakan

Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untukmelaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusatdan Daerah. Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip prinsip profesionalisme,

akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.

2. **Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan**

   Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Fungsional Perisalah Legislatif**

   Fungsional Perisalah Legislatif adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislative yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif.

4. **Fungsional Perencana**

   Secara umum tugas jabatan fungsional perencana adalah membantu Pimpinan dalam menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

5. **Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah**

   Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerahterutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, sistem dan prosedur, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan, dilakukan pada sebagian atau keseluruhan siklus pengelolaan keuangan negara dan daerah.

6. **Fungsional Hubungan Masyarakat**

   Tugas dan Fungsi Fungsional Hubungan Masyarakat adalah membangun dan mempertahankan citra atau kesan yang baik. Citra positif lembaga merupakan tujuan akhir setiap kegiatan kehumasan. Humas sangat berperan dalam memberikan informasi kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami. Kegiatan kehumasan yang paling umum adalah menulis, menyunting (editing), editing foto dan video, mengelola media internal, termasuk pengelolaan website dan media sosial, membuat *press release* (rilis), menggelar konferensi pers, dan kunjungan ke media (*media visit*).

7. **Fungsional Arsiparis**

   Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu diduduki oleh Arsiparis PNS yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis menjadi informasi publik pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.

8. **Fungsional Pranata Komputer**

   Fungsional Pranata Komputer adalah melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama penyelenggaraan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan melaksanakan 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) subkegiatan. Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp**.** 130.077.038.339,- yang merupakan gabungan antara Anggaran DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD.

Adapun Anggaran Tahun 2024 Sebesar Rp. 130.077.038.339,- sampai dengan Bulan Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 120.568.582.054,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9.508.456.285 (7,31%). Realisasi keuangan program dan kegiatan Tahun 2024 adalah rata-rata sebesar 92,69%, dan realisasi fisik rata-rata 96,40%. Realisasi berdasarkan program yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.70.568.136.612,- (95,08%).
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Rp.50.000.445.442,- (89,51%).

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis untuk mewujudkan aspirasi Masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Good governance digerakkan oleh prinsip- prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dalam organisasi untuk mencapai tujuannya, karena manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya lainnya berkerja dan berdampak langsung terhadap kinerja organisasi. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB perlu disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pelayanan terhadap kegiatan dan tugas-tugas DPRD. Sumber daya manusia yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.1
Jumlah PNS Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	-	3
3	Eselon IV	-	1	1
4	Fungsional Khusus	8	3	11
5	Fungsional Umum	71	32	103
	Total	83	36	119

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. NTB Des Tahun 2024

b. Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 5 orang atau 4,20%, golongan III sebanyak 75 orang atau 63,03% dan golongan II sebanyak 37 orang atau 31,09% dan sisa golongan I sebanyak 2 orang atau 1,68%.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Golongan IV	5	-	5
2.	Golongan III	49	26	75
3.	Golongan II	27	10	37
4.	Golongan I	2	-	2
	Total	83	36	119

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. NTB Des Tahun 2024

c. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa pegawai yang mendominasi adalah pegawai berpendidikan D1/D2 ke atas sebanyak 67 orang atau 56,30%, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi NTB mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 45,76% di tahun 2023. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024
Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	PENDIDIKAN S3	0	0	0
2.	PENDIDIKAN S2	9	1	10
3.	PENDIDIKAN S1	32	18	50
4.	PENDIDIKAN D IV	1	1	2
5.	PENDIDIKAN D III	2	2	4
6.	PENDIDIKAN D II	0	1	1
7.	PENDIDIKAN D I	0	0	0
8.	PENDIDIKAN SMK/SMA/PAKET C	35	13	48
9.	PENDIDIKAN SMP/PAKET B	3	0	3
10.	PENDIDIKAN SD	1	0	1
	Total	83	36	119

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. NTB Des Tahun 2024

d. Pegawai Non PNS

Sumber daya manusia Sekretariat DPRD Provinsi NTB selain PNS juga terdapat Pegawai Tidak Tetap sebanyak 3 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 153 orang.

2.2.2 Sumber Daya Modal/Anggaran

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB diantaranya adalah gedung DPRD, Gedung Sekretariat DPRD, Kendaraan Dinas,Komputer dan lain-lain. Rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2022

No	Nama Aset	Jumlah*
1	*2*	*3*
1	Alat-alat Besar	18 Buah
2	Alat-alat Angkutan	90 Buah
3	Alat Pertanian	18 Buah
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.247 Buah
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	460 Buah
6	Alat-alat Kedokteran	1 Buah
7	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	229 Buah
8	Bangunan Gedung	23 Buah
9	Monumen	2 Buah
10	Jalan dan Jembatan	1 Buah
11	Instalasi	4 Buah
12	Jaringan	32 Buah
13	Barang Bercorak Kebudayaan	9 Buah

Sumber : Sub Bagian Urusan Dalam dan Pengamanan Dalam Tahun 2023 Data Sementara*

Seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris, nilai buku Asset Tetap pada akhir tahun 2021 sebesar Rp**. 51.532.883.311,26** sedangkan Aset Lainnya (asset tetap yang tidak digunakan) sebesar Rp**. 1.917.473.737,00.** Rincian aset tetap dan aset lainnya dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah.

Tabel 2.5
Kondisi Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023(Rp)	2022 (Rp)
1	*2*	*3*
ASET TETAP		
Tanah	13.379.350.000,00	13.379.350.000,00
Peralatan dan Mesin	36.250.550.448,41	34.024.075.808,41
Gedung dan Bangunan	38.123.371.091,26	38.123.371.091,26
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.396.558.372,00	1.437.619.299,00
Aset Tetap Lainnya	966.834.550,00	966.834.550,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	147.180.000,00	147.180.000,00
Akumulasi Penyusutan	(38.730.961.150,41)	(37.909.770.254,41)
JUMLAH ASET TETAP	51.532.883.311,26	50.168.660.494,26
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00
Aset Lain-lain	1.917.473.737,00	35.400.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	1.917.473.737,00	35.400.000,00
JUMLAH ASET TETAP DAN ASET LAINNYA	**51.532.883.311,26**	**50.168.660.494,26**

Sumber : Laporan Keuangan Setwan 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD yang merupakan lembaga yang melakukan pelayanan/fasilitasi terhadap DPRD dalam rangka membantu menyelenggarakan tugas dan wewenang DPRD memberikan pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya. Salah satu ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD yaitu berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat disajikan dalam tabel 2.6 dan 2.7 sebagai berikut**:**

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023

No	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Indikator Kinerja sesuai Tugasdan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target RenstraTahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		TUJUAN: Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas		Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik*	100	100	100	100	100	100
		SASARAN: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		Tingkat Kepuasan DPRDTerhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1				Rancangan peraturan daerahyang dibahas dan disetujui	Perda	16	16	16	12	12	12	14	14	11	16	8	4	87,50	87,50	68,75	133,33	66,67	33,33
2				Kegiatan hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang Difasilitasi	Kali	480	480	120	48	480	48	540	540	60	1077	925	48	112,50	112,50	50,00	2,243	192,71	1,000.
3				Rapat Alat KelengkapanDewan yang difasilitasi	Kali	252	252	480	480	480	480	268	268	540	192	207	480	106,35	106,35	112,50	40.00	43,13	100
4				Rapat Paripurna yangdifasilitasi	Kali	48	48	252	48	48	36	46	46	268	40	42	46	95,83	95,83	106,35	83,33	87,50	127,78
5				Laporan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota	Ka	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	6	66	10	10	10	100

No	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Indikator Kinerja sesuai Tugasdan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target RenstraTahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
				DPRDyang difasilitasi	li													6.67	.67	0	0	0	
6				Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD yangdifasilitasi	Kali	28	28	2860	2860	2860	2860	28	28	2898	4918	3182	2860	100	100	101,33	171,96	111,26	**100**
7				Kegiatan Peningkatan Kapasitas (bintek/workshop)yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali/ Orang	3	3	65	65	65	65	3	3	65	65	65	65	100	100	100	100	100	**100**
8				Publikasi Kegiatan Pimpinandan Anggota DPRD yang difasilitasi	Kali	32	32	32	36	36	36	39	39	53	53	68	36	121,00	121,88	165,63	147,22	188,89	100

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Anggaran Sekretariat DPRD pada Renstra Tahun 2021-2025

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**56.052.686.737**	**63.521.437.877**	**70.036.047.294**	**78.948.221.624**	**77.527.186.057**	**62.442.348.027**	**70.134.887.190**	**75.851.947.855**	**74.219.854.919**	**74.671.864.174**	**111,40**	**110,41**	**108,30**	**94,01**	**96,32**	**8,32**	**7,16**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**289.741.100**	**328.346.682**	**358.488.325**	**607.311.900**	**668.043.090**	**374.044.100**	**545.298.200**	**582.119.900**	**576.441.700**	**603.747.200**	**129,10**	**166,07**	**162,38**	**94,92**	**90,38**	**7,91**	**18,54**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.187.700	30.810.234	33.676.093	196.351.200	215.986.320	84.027.100	183.271.000	208.439.200	186.337.900	193.128.600	309,06	594,84	618,95	94,90	89,42	7,96	49,35
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80.564.200	91.298.707	99.790.989	82.371.400	90.608.540	77.348.900	77.806.000	78.131.600	83.834.100	64.339.000	96,01	85,22	78,30	101,78	71,01	7,96	0,34
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	75.288.800	85.320.404	93.156.605	118.314.400	130.145.840	64.651.700	105.361.200	70.795.800	93.733.600	108.733.600	85,87	123,49	76,00	79,22	83,55	7,91	3,17
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.042.000	34.044.846	37.211.576	13.068.300	14.375.130	12.058.800	12.968.900	13.068.300	13.048.300	13.058.200	40,14	38,09	35,12	99,85	90,84	7,96	2,79
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	27.119.000	30.732.380	33.590.997	30.284.000	33.312.400	36.843.800	23.440.000	24.472.400	30.184.000	30.184.000	135,86	76,27	72,85	99,67	90,61	7,96	(11,19)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.488.400	25.484.791	27.555.296	42.391.200	46.630.320	14.988.300	35.135.100	34.741.200	40.292.400	40.292.400	66,65	137,87	126,08	95,05	86,41	7,51	43,93
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.051.000	30.655.320	33.506.769	124.531.400	136.984.540	84.125.500	107.316.000	152.471.400	129.011.400	154.011.400	310,99	350,07	455,05	103,60	112,43	7,96	27,08
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**11.847.520.666**	**12.166.160.627**	**15.306.870.980**	**13.501.030.185**	**14.272.099.825**	**11.274.963.216**	**13.032.504.344**	**13.004.009.985**	**14.930.918.043**	**14.110.176.266**	**95,17**	**107,12**	**84,96**	**110,59**	**98,87**	**9,73**	**5,11**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.441.115.466	11.725.605.329	14.803.476.460	12.740.333.785	13.435.333.785	10.804.281.216	12.364.337.344	12.243.333.785	14.359.262.193	13.582.920.416	94,43	105,45	82,71	112,71	101,10	9,80	4,44
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	212.711.400	241.053.417	263.475.352	342.078.100	376.285.910	246.500.400	235.002.900	316.878.100	316.083.600	316.683.600	115,88	97,49	120,27	92,40	84,16	7,96	9,52
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	169.372.500	171.939.971	209.793.547	219.662.700	241.628.970	194.872.300	214.449.700	258.662.700	223.923.250	178.923.250	115,06	124,72	123,29	101,94	74,05	7,96	10,91
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.974.800	3.371.167	3.684.741	30.208.600	33.229.460	2.974.800	30.207.400	30.208.600	30.173.600	30.173.600	100,00	896,05	819,83	99,88	90,80	7,96	305,16
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.346.500	24.190.743	26.440.880	168.747.000	185.621.700	26.334.500	188.507.000	154.926.800	1.475.400	1.475.400	123,37	779,25	585,94	0,87	0,79	7,96	162,77
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**19.825.000**	**22.466.516**	**24.556.271**	**18.475.000**	**20.322.500**	**19.825.000**	**19.825.000**	**18.475.000**	**37.962.000**	**8.562.000**	**100,00**	**88,24**	**75,24**	**205,48**	**42,13**	**7,96**	**(2,27)**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.625.000	1.841.518	2.012.809	2.010.000	2.211.000	1.625.000	1.625.000	2.010.000	3.531.000	3.531.000	100,00	88,24	99,86	175,67	159,70	7,96	7,90
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.125.000	6.941.105	7.586.742	7.475.000	8.222.500	6.125.000	6.125.000	7.475.000	4.521.000	4.521.000	100,00	88,24	98,53	60,48	54,98	7,96	7,35
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.075.000	13.683.893	14.956.720	8.990.000	9.889.000	12.075.000	12.075.000	8.990.000	29.910.000	510.000	100,00	88,24	60,11	332,70	5,16	7,96	(8,52)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**279.643.200**	**328.903.321**	**363.180.545**	**943.995.900**	**1.037.095.490**	**168.938.800**	**1.306.368.000**	**889.023.900**	**1.460.323.700**	**706.150.200**	**60,41**	**397,19**	**244,79**	**154,70**	**68,09**	**9,96**	**142,08**
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60.155.400	68.170.605	74.511.593	433.746.200	477.120.820	69.452.000	366.952.000	433.746.200	470.250.000	59.451.000	115,45	538,28	582,12	108,42	12,46	7,96	174,84
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	6.000.000	8.400.000	53.617.500	58.979.250	-	742.150.000	53.617.500	750.604.500	290.000.000	#DIV/0!	12.369,17	638,30	1.399,92	491,70	#DIV/0!	#DIV/0!
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.486.800	33.415.670	36.523.877	189.782.200	208.760.420	29.486.800	69.266.000	232.660.200	39.959.200	172.699.200	100,00	207,29	637,01	21,06	82,73	7,96	229,68
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	6.000.000	8.400.000	40.000.000	45.000.000	-	-	-	22.000.000	15.000.000	#DIV/0!	-	-	55,00	33,33	#DIV/0!	#DIV/0!
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.001.000	28.332.174	30.967.533	23.000.000	23.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	88,24	-	-	-	7,96	#DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165.000.000	186.984.872	204.377.542	203.850.000	224.235.000	70.000.000	103.000.000	169.000.000	177.510.000	169.000.000	42,42	55,08	82,69	87,08	75,37	7,96	47,14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**908.391.000**	**986.080.908**	**1.125.180.121**	**3.451.664.580**	**3.796.831.038**	**1.196.268.400**	**4.549.289.940**	**4.650.038.630**	**5.764.775.050**	**3.301.988.900**	**131,69**	**461,35**	**413,27**	**167,01**	**86,97**	**7,96**	**96,24**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93.390.000	105.833.437	115.677.689	118.460.000	130.306.000	93.390.000	131.208.000	127.410.000	72.680.000	72.680.000	100,00	123,98	110,14	61,35	55,78	7,96	12,14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.967.000	95.154.901	104.005.873	337.662.600	371.428.860	202.842.000	937.023.650	351.053.100	629.229.650	226.048.100	241,57	984,74	337,53	186,35	60,86	7,96	24,36
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.700	159.987.040	185.798.633	228.964.980	251.861.478	201.318.500	150.715.740	263.796.530	267.240.300	246.034.700	134,21	94,20	141,98	116,72	97,69	7,96	10,34
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.004.400	73.665.693	80.517.815	102.788.000	113.066.800	65.004.400	56.700.000	102.788.000	102.788.000	102.788.000	100,00	76,97	127,66	100,00	90,91	7,96	19,37
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	206.480.000	213.991.735	255.756.818	173.980.000	191.378.000	206.480.000	179.380.000	173.980.000	170.680.000	133.030.000	100,00	83,83	68,03	98,10	69,51	7,96	(5,25)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.368.000	113.741.198	124.321.001	1.550.000.000	1.705.000.000	199.500.000	2.030.250.000	2.253.500.000	2.631.100.000	1.461.500.000	198,77	1.784,97	1.812,65	169,75	85,72	7,96	343,19
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.070.000	38.609.543	42.200.866	715.700.000	787.270.000	34.070.000	937.202.000	1.196.280.000	1.791.595.000	855.200.000	100,00	2.427,38	2.834,73	250,33	108,63	7,96	1.137,08
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.160.900	100.160.900	124.064.476	149.419.000	164.360.900	118.713.500	52.120.550	106.541.000	24.796.100	25.042.100	118,52	52,04	85,88	16,60	15,24	7,96	(3,42)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.950.000	84.936.461	92.836.950	74.690.000	82.159.000	74.950.000	74.690.000	74.690.000	74.666.000	179.666.000	100,00	87,94	80,45	99,97	218,68	7,96	(0,12)
Pengadaan Barang Milik Daerah	**484.936.500**	**1.072.434.828**	**2.202.672.491**	**4.416.893.000**	**2.200.060.207**	**305.252.600**	**61.000.000**	**4.212.373.000**	**537.529.660**	**4.383.489.208**	**62,95**	**5,69**	**191,24**	**12,17**	**199,24**	**118,07**	**426,65**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	700.000.000	1.368.715.842	3.062.930.000	910.700.907	-	-	3.375.000.000	-	2.215.130.000	#DIV/0!	-	246,58	-	243,23	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	30.000.000	355.230.534	76.575.000	84.232.500	-	-	76.575.000	-	-	#DIV/0!	-	21,56	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	200.000.000	10.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	(16,67)	#DIV/0!
Pengadaan Mebel	-	188.871.332	224.605.597	186.000.000	204.600.000	-	24.000.000	193.500.000	355.264.660	408.950.000	#DIV/0!	12,71	86,15	191,00	199,88	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	214.726.500	63.998.600	67.784.594	1.091.388.000	1.000.526.800	235.042.600	37.000.000	567.298.000	182.265.000	529.181.000	109,46	57,81	836,91	16,70	52,89	(22,81)	47,12
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	70.210.000	79.564.896	86.335.924	-	-	70.210.000	-	-	-	1.230.228.208	100,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	7,66	(33,33)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**4.270.769.200**	**4.270.769.200**	**4.537.377.161**	**6.076.341.360**	**6.683.975.496**	**4.370.769.200**	**5.596.738.760**	**6.148.265.860**	**6.252.769.520**	**6.058.220.520**	**102,34**	**131,05**	**135,50**	**102,90**	**90,64**	**2,08**	**13,56**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.418.000	9.418.000	11.298.356,97	20.875.000	22.962.500,00	9.418.000	27.175.000	20.875.000	78.849.000	18.325.000	100,00	288,54	184,76	377,72	79,80	6,66	40,55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	737.863.200	737.863.200,00	813.333.419,22	965.089.000	1.061.597.900,00	737.863.200	902.197.200	981.851.500	964.000.000	966.500.000	100,00	122,27	120,72	99,89	91,04	3,41	11,02
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.523.488.000	3.523.488.000,00	3.712.745.384,47	5.090.377.360	5.599.415.096,00	3.623.488.000	4.667.366.560	5.145.539.360	5.209.920.520	5.073.395.520	102,84	132,46	138,59	102,35	90,61	1,79	14,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.068.746.000**	**2.282.036.526**	**2.454.390.544**	**4.676.151.119**	**2.951.369.300**	**2.432.471.340**	**1.898.151.000**	**2.623.183.000**	**2.058.082.000**	**1.633.866.000**	**117,58**	**83,18**	**106,88**	**44,01**	**55,36**	**6,21**	**2,61**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.600.000	167.600.000,00	186.204.396,22	167.600.000	184.360.000,00	167.600.000	167.600.000	167.600.000	167.600.000	167.600.000	100,00	100,00	90,01	100,00	90,91	3,70	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.198.060.000	1.198.060.000,00	1.231.050.352	666.160.000	732.776.000	1.198.060.000	696.706.000	673.780.000	730.470.000	730.470.000	100,00	58,15	54,73	109,65	99,69	0,92	(14,59)
Pemeliharaan Mebel	25.000.000	25.000.000	27.775.119	27.500.000	30.250.000	25.000.000	12.500.000	27.500.000	17.500.000	17.500.000	100,00	50,00	99,01	63,64	57,85	3,70	3,33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.300.000	350.300.000	389.184.964	417.358.000	459.093.800	350.300.000	234.150.000	349.858.000	355.446.000	310.796.000	100,00	66,84	89,90	85,17	67,70	3,70	(0,04)
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.500.000	12.500.000	13.887.559	35.000.000	38.500.000	25.000.000	787.195.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	200,00	6.297,56	252,02	100,00	90,91	3,70	13,33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.286.000	271.281.300	311.611.547	3.362.533.119	1.506.389.500	666.511.340	-	1.369.445.000	752.066.000	372.500.000	211,40	-	439,47	22,37	24,73	(0,39)	35,15
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	257.295.226	294.676.607	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**34.909.203.571**	**40.960.563.331**	**42.473.097.432**	**44.309.253.080**	**44.889.853.080**	**40.899.203.571**	**42.315.913.096**	**42.839.253.080**	**41.721.238.426**	**43.126.059.360**	**117,16**	**103,31**	**100,86**	**94,16**	**96,07**	**7,22**	**1,58**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	34.909.203.571	39.560.563.331	40.929.614.114	43.503.253.080	44.003.253.080	40.509.203.571	41.925.913.096	42.303.253.080	41.113.488.426	42.128.309.360	116,04	105,98	103,36	94,51	95,74	5,75	1,48
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	1.110.000.000	1.219.106.418	416.000.000	457.600.000	390.000.000	0	416.000.000	607.750.000	607.750.000	#DIV/0!	-	34,12	146,09	132,81	#DIV/0!	2,22
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	290.000.000	324.376.900	390.000.000	429.000.000	0	390.000.000	120.000.000	-	390.000.000	#DIV/0!	134,48	36,99	-	90,91	#DIV/0!	#DIV/0!
Layanan Adminstrasi DPRD	**973.910.500**	**1.103.675.938**	**1.190.233.424**	**947.105.500**	**1.007.536.031**	**1.400.611.800**	**809.798.850**	**885.205.500**	**879.814.820**	**739.604.520**	**143,81**	**73,37**	**74,37**	**92,90**	**73,41**	**7,40**	**(12,27)**
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	-	-	-	68.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fasilitasi Fraksi DPRD	60.005.100	68.000.278	73.333.305	304.727.100	300.719.791	122.632.400	198.740.700	304.727.100	311.184.220	229.320.720	204,37	292,26	415,54	102,12	-	7,40	49,50
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	488.175.400	553.220.694	596.607.879	154.378.400	169.816.240	589.416.400	154.364.800	160.478.400	148.630.600	90.283.800	120,74	27,90	26,90	96,28	-	7,40	(24,26)
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	425.730.000	482.454.966	520.292.240	420.000.000	462.000.000	688.563.000	456.693.350	420.000.000	420.000.000	420.000.000	161,74	94,66	80,72	100,00	-	7,40	(13,00)
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**42.897.113.800**	**48.612.597.002**	**53.597.999.999**	**49.120.214.981**	**40.841.250.548**	**49.421.565.795**	**58.042.944.551**	**58.906.488.750**	**55.857.183.420**	**70.819.799.060**	**115,21**	**119,40**	**109,90**	**113,72**	**173,40**	**8,32**	**6,40**
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	**3.132.536.800**	**3.535.354.861**	**3.895.967.790**	**4.909.930.300**	**5.095.923.330**	**7.244.596.200**	**12.619.972.300**	**1.563.666.300**	**1.541.334.500**	**12.991.063.600**	**231,27**	**356,96**	**40,14**	**31,39**	**254,93**	**8,12**	**(26,14)**
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	344.602.300	344.602.300	413.404.098	770.666.800	847.733.480	609.150.800	761.222.800	770.666.800	-	-	176,77	220,90	186,42	-	-	6,66	8,84
Pembahasan Rancangan Perda	354.746.000	354.746.000	425.573.045	264.861.500	291.347.650	433.569.400	313.911.500	468.597.500	293.218.500	186.379.500	122,22	88,49	110,11	110,71	63,97	6,66	2,69
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.110.968.500	2.510.968.500	2.719.612.834	3.450.000.000	3.500.000.000	5.929.656.000	11.222.968.000	-	1.213.336.000	12.768.908.000	280,90	446,96	-	35,17	364,83	9,61	(33,33)
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	301.070.000	301.070.000	311.180.328	301.552.000	331.707.200	251.070.000	301.320.000	301.552.000	-	-	83,39	100,08	96,91	-	-	1,12	6,70
Penyusunan Tata Tertib DPRD	21.150.000	23.968.061	26.197.485	22.850.000	25.135.000	21.150.000	20.550.000	22.850.000	34.780.000	35.776.100	100,00	85,74	87,22	152,21	142,34	7,96	2,68
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pembahasan Kebijakan Anggaran	**679.505.900**	**769.641.386**	**835.575.696**	**1.359.581.000**	**1.495.539.100**	**708.406.300**	**988.010.000**	**1.311.176.000**	**654.466.200**	**1.428.088.500**	**104,25**	**128,37**	**156,92**	**48,14**	**95,49**	**7,66**	**28,36**
Pembahasan KUA dan PPAS	150.008.500	169.995.880	184.462.647	405.747.500	446.322.250	250.567.500	379.717.500	393.017.500	92.966.200	420.998.500	167,04	223,37	213,06	22,91	94,33	7,66	18,95
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	163.574.500	184.966.436	201.144.503	364.984.500	401.482.950	143.434.500	155.684.500	219.139.500	92.609.000	381.208.500	87,69	84,17	108,95	25,37	94,95	7,66	17,59
Pembahasan APBD	149.946.300	169.925.392	184.386.160	186.777.000	205.454.700	149.725.500	143.587.000	228.687.000	142.801.000	199.133.500	99,85	84,50	124,03	76,46	96,92	7,66	17,58
Pembahasan Perubahan APBD	107.988.300	122.376.839	132.791.193	243.381.000	267.719.100	111.060.500	193.960.500	311.641.000	203.509.000	250.519.000	102,84	158,49	234,68	83,62	93,58	7,66	60,20
Pembahasan Laporan Semester	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	107.988.300	122.376.839	132.791.193	158.691.000	174.560.100	53.618.300	115.060.500	158.691.000	122.581.000	176.229.000	49,65	94,02	119,50	77,25	100,96	7,66	65,32

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**308.681.800**	**308.681.800**	**460.054.931**	**566.694.400**	**638.363.840**	**636.799.095**	**414.604.900**	**459.934.700**	**608.583.570**	**605.433.660**	**206,30**	**134,31**	**99,97**	**107,39**	**94,84**	**16,35**	**(9,26)**
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	50.002.800	50.002.800,00	78.324.639,51	81.208.400	89.329.240,00	257.848.495	80.022.500	86.208.400	125.118.500	310.893.550	515,67	160,04	110,07	154,07	348,03	18,88	(22,19)
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	50.002.800	50.002.800,00	78.324.639,51	96.620.100	106.282.110,00	70.070.700	93.930.700	86.620.500	118.123.170	72.373.170	140,13	187,85	110,59	122,26	68,10	18,88	7,87
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	50.002.800	50.002.800,00	78.324.639,51	91.625.300	100.787.830,00	70.070.700	81.187.500	81.622.000	130.477.330	73.532.370	140,13	162,37	104,21	142,40	72,96	18,88	5,50
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50.002.800	50.002.800,00	78.324.639,51	73.620.300	80.982.330,00	70.070.700	87.051.700	103.628.500	118.123.170	72.373.170	140,13	174,09	132,31	160,45	89,37	18,88	15,96
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	50.002.800	50.002.800,00	78.324.639,51	73.620.300	80.982.330,00	70.070.700	72.412.500	101.855.300	116.741.400	76.261.400	140,13	144,82	130,04	158,57	94,17	18,88	15,12
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	58.667.800	58.667.800,00	68.431.733,54	-	-	98.667.800	-	-	-	-	168,18	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5,55	(33,33)
Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	-	-	120.000.000	140.000.000,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	-	-	30.000.000	40.000.000,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Peningkatan Kapasitas DPRD	**4.579.091.400**	**4.179.091.400**	**4.944.839.124**	**6.094.588.600**	**6.704.047.460**	**4.205.047.500**	**6.039.983.800**	**7.209.687.700**	**4.690.744.800**	**5.066.628.200**	**91,83**	**144,53**	**145,80**	**76,97**	**75,58**	**2,66**	**23,82**
Orientasi DPRD	0	0	0	400.000.000	440.000.000	0	0	0	1.097.931.600	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	274,48	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD	2.009.777.100	1.809.777.100	2.068.121.150	3.242.567.800	3.566.824.580	1.201.663.800	2.811.615.900	4.372.991.900	987.799.500	3.096.274.500	59,79	155,36	211,45	30,46	86,81	0,97	87,97
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	425.580.000	425.580.000	510.549.454	446.180.000	490.798.000	474.180.000	513.480.000	681.155.000	789.400.000	374.300.000	111,42	120,65	133,42	176,92	76,26	6,66	14,55
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360.995.100	360.995.100	433.069.814	455.702.400	501.272.640	460.761.600	436.101.600	455.702.400	454.760.200	456.960.200	127,64	120,81	105,23	99,79	91,16	6,66	(0,37)
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	62.448.000	62.448.000	74.916.096	108.660.000	119.526.000	62.448.000	132.448.000	154.410.000	25.500.000	58.500.000	100,00	212,09	206,11	23,47	48,94	6,66	49,09
Penyusunan Program Kerja DPRD	475.209.900	475.209.900	570.088.244	59.977.900	65.975.690	167.728.800	44.018.500	59.977.900	14.298.500	21.893.500	35,30	9,26	10,52	23,84	33,18	6,66	(21,41)
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.245.081.300	1.045.081.300	1.288.094.366	1.381.500.500	1.519.650.550	1.838.265.300	2.102.319.800	1.485.450.500	1.321.055.000	1.058.700.000	147,64	201,16	115,32	95,62	69,67	1,15	(6,40)
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**20.829.849.000**	**25.917.854.179**	**29.149.361.722**	**26.432.469.100**	**16.171.556.505**	**29.863.348.600**	**28.798.305.551**	**35.683.464.350**	**26.640.116.150**	**25.690.008.150**	**143,37**	**111,11**	**122,42**	**100,79**	**158,86**	**13,31**	**6,50**
Kunjungan Kerja dalam Daerah	6.259.050.000	8.093.016.127	10.322.283.417	8.202.200.000	8.202.200.000	8.468.550.000	7.256.912.651	8.828.799.750	8.753.600.000	7.002.400.000	135,30	89,67	85,53	106,72	85,37	21,64	1,42
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	120.299.000	136.327.837	149.008.569	308.198.000	339.017.800	161.149.000	97.048.000	268.148.000	64.555.000	1.065.647.000	133,96	71,19	179,95	20,95	314,33	7,96	22,13
Pelaksanaan Reses	14.450.500.000	17.688.510.215	18.678.069.736	17.822.071.100	7.530.338.705	21.233.649.600	21.444.344.900	26.586.516.600	17.821.961.150	17.621.961.150	146,94	121,23	142,34	100,00	234,01	9,75	8,40
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**33.206.400**	**37.630.876**	**41.131.166**	**36.308.300**	**39.939.130**	**14.901.400**	**38.477.200**	**31.828.300**	**68.953.800**	**49.608.950**	**44,88**	**102,25**	**77,38**	**189,91**	**124,21**	**7,96**	**37,86**
Penyusunan Kode Etik DPRD	15.004.300	17.003.498	18.585.103	28.846.400	31.731.040	8.195.800	28.848.900	24.366.400	39.861.400	28.614.950	54,62	169,66	131,11	138,19	90,18	7,96	65,77

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
Pengawasan Kode Etik DPRD	18.202.100	20.627.378	22.546.063	7.461.900	8.208.090	6.705.600	9.628.300	7.461.900	29.092.400	20.994.000	36,84	46,68	33,10	389,88	255,77	7,96	3,76
Fasilitasi Tugas DPRD	**13.334.242.500**	**13.864.342.500**	**14.271.069.570**	**9.720.643.281**	**10.695.881.184**	**6.748.466.700**	**9.143.590.800**	**12.646.731.400**	**21.652.984.400**	**24.988.968.000**	**50,61**	**65,95**	**88,62**	**222,75**	**233,63**	**2,34**	**29,13**
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.000.550.000	12.000.550.000	12.320.557.920	8.713.266.881	9.687.872.144	4.239.950.000	8.405.165.000	11.833.050.000	20.654.400.000	24.037.500.000	35,33	70,04	96,04	237,05	248,12	0,89	59,69
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	11.530.500	11.530.500	13.832.630	10.675.000	11.742.500	11.530.500	11.530.500	10.675.000	-	-	100,00	100,00	77,17	-	-	6,66	(2,47)
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	122.162.000	122.162.000	136.525.279	81.832.100	90.015.310	114.748.600	98.787.100	81.832.100	78.556.500	124.557.100	93,93	80,87	59,94	96,00	138,37	3,92	(9,56)
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.200.000.000	1.730.100.000	1.800.153.741	706.174.300	776.791.730	2.382.237.600	628.108.200	721.174.300	920.027.900	826.910.900	198,52	36,30	40,06	130,28	106,45	16,67	(23,24)
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-	-	-	208.695.000	129.459.499	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH TOTAL	**98.949.800.537**	**112.134.034.879**	**123.634.047.293**	**128.068.436.605**	**118.368.436.605**	**111.863.913.822**	**128.177.831.741**	**134.758.436.605**	**130.077.038.339**	**145.491.663.234**	**113,05**	**114,31**	**109,00**	**101,57**	**122,91**	**8,32**	**6,82**

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

Catatan *: Angka Sementara

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Provinsi NTB, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTB serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada :

1) Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
2) Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :
   a. Kekuatan (***strengths***)

   Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

   1) Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
   2) Tersedianya anggaran yang cukup memadai.

3) Tersedianya Tata Tertib DPRD Provinsi NTB berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
4) Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD
5) Struktur Organisasi Kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
6) Komitmen dan Kerjasama yang baik antara staff.

b. Kelemahan (***weaknesse*s**)

Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor yaitu :

1) Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan.
2) Ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3) Beban Kerja Sekretariat DPRD yang tidak merata.
4) Kurangnya disiplin dan motivasi kerja ASN.
5) Tingginya frekuensi Kerja Insidentil.
6) Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi masing masing.
7) Belum Optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (***Opportunities***)

Pada sisi peluang, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

1) Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraanpemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik kedepan;

3) Penggunaan Teknologi Informasi yang semakin berkembang.
4) Dukungan Kebijakan dan Komitmen Organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD.
5) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
6) Pemanfaatan Tenaga Ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

b. Tantangan/ancaman/hambatan (***Threats***)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

1) Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
2) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan;
3) Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terjadwal menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya.
4) Tingginya standart pelayanan yang dibutuhkan DPRD.
5) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Lembaga Perwakilan.
6) Masih lemahnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya.
7) Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi selalu berubah ubah.
8) Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat DPRD.

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat.

Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Provinsi NTB akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

BAB III
PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretariat DPRD mempunyai tugas yaitu Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugasdan fungsi DPRD, serta Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan analisis struktur, tugas, fungsi serta gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada BAB II, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah **"Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Layanan dan Kinerja Lembaga Legislatif".**

Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek Sumber Daya Manusia
   a) Aspek Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang paling penting. Di sisi sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang cukup besar terdiri atas Aparatur SipilNegara (ASN), Pegawai Pemerintah Non ASN, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota merupakan salah sumber daya untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pembagian tugas yang jelas dan terarah sehingga produktifitas meningkat. Namun, besarnya jumlah sumber daya manusia tersebut dapat menjadi masalah apabila dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan usia. Tingkat Pendidikan PNS pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024, dengan tingkat pendidikan Diploma ke Atas mencapai $\pm$ 56,30% dan Golongan I dan II mencapai $\pm$ 32,77%. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun usia berpengaruh terhadap penerimaan atas perubahan dan perkembangan teknologi, hal yang sangat berperan dalam perkembangan organisasi Sumber daya Manusia Kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

b) Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
c) Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi masing masing.

2. Aspek kelembagaan

Permasalahan dalam aspek kelembagaan merupakan permasalahan yang bersifat menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh karena organisasi Setwan diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, permasalahan kelembagaan adalah sebagai berikut:

a) Sekretariat DPRD Provinsi NTB merupakan *supportingsystem* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, Lembaga legislative yang berperan dalam menentukan berbagai kebijakan di Provinsi NTB. Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat memanfaatkan dukungan DPRD Provinsi NTB untuk meningkatkan dan mempercepat kinerjanya. Namun demikian Sekretariat DPRD Provinsi NTB meskipun dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Provinsi NTB, tidak dapat melepaskan dirinya sebagai aparatur pemerintah yang harus mengikuti ketentuan dan kebijakan pemerintah yang kadangkala bersinggungan dengan kebijakan DPRD Provinsi NTB.
b) Struktur Organisasi Kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang perlu ditinjau kembali agar ada kesesuaian antara tugas fungsi dengan bagian lainnya.
c) Aspek lainnya adalah Belum optimalnya peran Lembaga DPRD dalam menjalankantugas dan fungsinya yakni pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan.

3. Aspek Sarana Prasarana.

Beberapa hal yang masih menjadi masalah pada aspek sarana dan prasarana adalah :

a) Masih perlu penataan lingkungan kantor dan ruangan, khususnya penataan ruang rapat, halaman, pagar Sekretariat DPRD dan pengadaan fasilitas eskalator untuk mempermudah mobilitas vertikal di gedung bertingkat, hal ini juga sangat terkait dengan kenyamanan, kemudahan kerja dan keamanan lingkungan kantor.
b) Banyak sarana kerja yang sudah saatnya diperbaharui, seperti mebeulair, kendaraan dinas/operasional, sound system dan voice recorder.
c) Belum tersedianya area merokok, jalur khusus disabilitas, ruang menyusui, tempat penitipan anak, press room, ruang medis dan ambulance.

3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mendukung pelaksanaan Visi NTB Emas 2045 dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045. Ultimate Goal RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 adalah : "***Terwujudnya Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Daerah Menuju NTB Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional, Bali dan Nusa Tenggara Yang Inklusif dan Berkelanjutan***".

Dalam rangka mewujudkan Ultimate Gold Rencana Pembangunan Daerah untuk Membangun Nusa Tenggara Barat yang Kuat, NTB yang Lestari dan Asri, NTB yang semakin Mandiri, Meningkatnya Tata Kelola Daerah melalui Reformasi Birokrasi, serta Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG's dan Peningkatan Daya Saing, ditetapkan 3 (tiga) Pilar Utama dan 3 (tiga) Pilar Pendukung RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Pilar Utama 1	:	PEMBANGUNAN MANUSIA BERKUALITAS, Meningkatnya Kualitas Manusia NTB yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Takwa (KUAT)
Pilar Utama 2	:	PEMBANGUNAN LINGKUNGAN YANG ASRI DAN LESTARI, Meningkatnya Kualitas Lingkungan NTB yang Lestari dan Asri
Pilar Utama 3	:	PEMBANGUNAN MASYARAKAT NTB SEJAHTERA, Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat NTB yang semakin Mandiri
Pilar Pendukung 1	:	TATA KELOLA, Meningkatnya Tata Kelola Daerah melalui Reformasi Birokrasi
Pilar Pendukung 2	:	SDG's, Meningkatnya Capaian Kinerja SDG's Untuk Mewujudkan Komitmen Global
Pilar Pendukung 3	:	DAYA SAING DAERAH, Meningkatnya Daya Saing Daerah Untuk Akselerasi Investasi Industrialisasi

Mengacu pada Pilar Utama dan Pilar Pendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi NTB memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), terutama pada **Tujuan ke-5 RPD, "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Tata kelola Pemerintahan Daerah"** dengan **Sasaran ke-16** "**Meningkatnya Kualitas Demokrasi di NTB".** Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah

menetapkan tujuan, sasaran dan strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) NTB Tahun 2024-2026 sebagaimana diuraikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi dalam RPD Provinsi NTB tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5	**Tujuan V: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**		**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB**	
			Indeks Reformasi Birokrasi	
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Demokrasi di NTB	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB**	**Reformasi Birokrasi Meningkatkan Pelayanan Publik danKemandirian Fiskal Daerah**
		Terwujudnya Peningkatan Kinerja Lembaga Legislatif	**Indeks Kinerja Lembaga Legislatif**	

Sumber: RPD NTB Tahun 2024-2026

Dalam upaya turut mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 tersebut, Sekretariat DPRD perlu menyusun strategi yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada DPRD, dengan mempertimbangkan segenap aspek yang terkait dengan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan dalam mencapai tujuannya yaitu:

A. KEKUATAN

1) Tersedianya anggaran yang memadai.
2) Tersedianya Tata Tertib DPRD Provinsi NTB yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
3) Dukungan Kebijakan dan komitmen Organisasi dalam pembinaan dan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD.
4) Ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang cukup dari Segi Kuantitas.
5) Terjalinnya hubungan Baik (Harmonis) antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.
6) Adanya Komitmen Pimpinan Sekretariat DPRD yang mendukung adanya Peningkatan Kapasitas ASN maupun DPRD.
7) Komitmen DPRD untuk mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah.

8) Pemanfaatan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

B. KELEMAHAN

1) Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuatitas maupun kualitas.
2) Beban kerja Sekretariat DPRD yang tidak merata.
3) Kurangnya disiplin dan motivasi kerja ASN.
4) Tingginya frekuensi kerja insidentil.
5) Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi masing masing.
6) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
7) Belum optimalnya pemanfaatan informasi kinerja serta tingginya dinamika kegiatandi sekretariat DPRD menjadi tantangan dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dalam langkah-langkah nyata.

C. PELUANG

1) Penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang.
2) Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompotensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD.
3) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
4) pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

D. HAMBATAN

1) Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terjadwal menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya.
2) Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD.
3) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
4) Masih lemahnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya.
5) Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi selalu berubah ubah.
6) Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi sekretariat DPRD.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Indonesia Emas Tahun 2045 merupakan langkah pemerintah dalam membangun Indonesia untuk menjadi Megatrend Dunia yang semakin sarat akan persaingan yang sangat ketat. Pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut membangun pilar Visi Indonesia 2045 sebagai bahan acuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa demi mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian menjadi acuan setiap langkah pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pencapaian impian dan visi Indonesia 2045 dibangun dengan 4 pilar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa, bernegara dan konstitusi.

4 Pilar Visi Indonesia 2045 tersebut yaitu:

1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan
4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan

Adapun tujuan 4 Pilar Indonesia sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sekretariat DPRD Provinsi NTB bukan merupakan lembaga teknis daerah sehingga tidak terdapat tugas dan fungsi yang berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Teknis di Pemerintah Pusat serta tidak secara langsung berhubungan dengan rencana strategis kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut maka Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 tidak menjabarkan Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RPD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024-2044. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang maju dan lestari melalui penataan ruang secara

serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mendorong wilayah provinsi sebagai kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam.

Berbagai potensi dan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi NTB haruslah bisa memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat NTB. Untuk itu Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan RTRW Provinsi NTB 2024-2044 dalam upaya pemanfaatan potensi sumber daya alami yang dimiliki agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai Perangkat Daerah yang memfasilitasi koordinasi antara pihak legislatif dengan eksekutif. Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat hadir dalam mengawal kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dalam RTRW dan perubahannya berdasarkan hasil KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, dengan menyelenggarakan empat fungsi yaitu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam melaksakan tugas dan fungsinya memerlukan dukungan dari berbagai unsur. Peningkatan pelayanan kepada DPRD tidak terlepas dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Beberapa permasalahan utama yang menghambat dalam pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Belum Optimalnya peran Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni fungsinya yakni pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan.
3. Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering. berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat

4. Lemahnya atau Menurunnya Nilai/Indeks Kinerja Lembaga Legislative.

Berdasarkan permasalahan utama tersebut maka dirumuskan Isu Strategis dalam upaya peningkatan pelayanan kepada DPRD yaitu:

“Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Layanan dan Kinerja Lembaga Legislatif”.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Dengan mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan memperhatikan Isu strategis dan Permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB.

Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek dan memberi arah serta dasar yang jelas bagi organisasi. Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksaannya sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran harus menyatakan persis apa yang ingin dicapai suatu organisasi atau tingkat-tingkat untuk mencapai tujuan. Sasaran bersifat operasional dengan periode waktu dan target yang lebih spesifik.

Dalam rangka mendukung tercapainya **Tujuan ke-5** pada Rencana Pembangunan Daerah NTB yaitu **"Terwujudnya Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah"** dengan **Sasaran ke-16 "Meningkatnya Kualitas Demokrasi di NTB,"** Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan tujuan untuk Tahun 2024-2026 yaitu: **"Terwujudnya Peningkatan Kinerja Lembaga Legislatif".** Untuk mewujudkan tujuan "terwujudnya peningkatan kinerja lembaga legislatif" Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan 2 sasaran yaitu:

1. **"Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD".**
2. **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD".**

Hubungan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB beserta indikator sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TAHUN					FORMULASI PENGUKURAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
A	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF		INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF	INDEKS			INDEKS 15,38	INDEKS 28,38	INDEKS 50,38	FORMULASI : RILIS/PUBLISH BADAN PUSAT STATISTIK KETERANGAN DATA: SUMBER INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
B		MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN LEGISLASI, BUDGETING DAN PENGAWASAN DPRD	PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENETAPAN PERDA	PERSENTA			100	100	100	JUMLAH WAKTU RIEL PENETAPAN PERDA DIBAGI JUMLAH WAKTU NORMAL PENETAPAN PERDA SUMBER DATA: DATA INTERNAL SEKRETARIAT DPRD NTB
			PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PEMBAHASAN ANGGARAN	PERSENTASE			100	100	100	JUMLAH WAKTU RIEL PENYELESAIAN PEMBAHASAN ANGGARAN DIBAGI JUMLAH WAKTU NORMAL PENYELESAIAN PEMBAHASAN ANGGARAN SUMBER DATA: DATA INTERNAL SEKRETARIAT DPRD NTB
			PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DPRD TERHADAP EKSEKUTIF	PERSENTASE			100	100	100	JUMLAH REKOMENDASI DIBAGI JUMLAH PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP EKSEKUTIF SUMBER DATA: DATA INTERNAL SEKRETARIAT DPRD NTB
		MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	TINGKAT KEPUASAN DPRD ATAS KUALITAS PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	KATEGORI	BAIK (76,61-88,30)	BAIK (76,61-88,30)	BAIK (76,61-88,30)	BAIK (76,61-88,30)	BAIK (76,61-88,30)	KATEGORI YANG DIBERIKAN SEBAGAI HASIL SURVEI TINGKAT KEPUASAN DPRD TERHADAP PELAYANAN YANG DIBERIKAN SEKRETARIAT DRPD. TERDAPAT 4 (EMPAT) KATEGORI PENILAIAN MUTU PELAYANAN: 1.88,31-100, Kategori Sangat Baik 2.76,61-88,30, Kategori Baik 3.65,00-76,60, Kategori Kurang Baik 4.25,00-64,99, Kategori Tidak Baik SUMBER DATA: KUISIONER

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TAHUN					FORMULASI PENGUKURAN
					2022	2023	2024	2025	2026	
			TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT	NILAI PERSEPSI			BAIK (62,51-81,25)	BAIK (62,51-81,25)	BAIK (62,51-81,25)	NILAI PERSEPSI YANG DIPEROLEH SEBAGAI HASIL SURVEY/KUISIONER PADA MASYARAKAT. TERDAPAT 4 (EMPAT) NILAI PERSEPSI YANG DIBERIKAN PADA PENILAIAN KINERJA: 1.81,26-100, Persepsi Sangat Baik 2.62,51-81,25, Persepsi Baik 3.50,00-62,50, Persepsi Kurang Baik 4.25,00-49,99, Persepsi Tidak Baik SUMBER DATA: HASIL SURVEY/QUISIONER PADA MASYARAKAT

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

4.2. Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Dengan Tujuan Dan Sasaran RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang telah diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional sehingga dapat dilaksanakan oleh masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Sekretariat DPRD Provinsi NTB masuk kedalam **Sasaran ke-16 "Meningkatnya Kualitas Demokrasi di NTB",** dan **Prioritas Pembangunan Daerah ke-4** yaitu **"Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah".** Berdasarkan uraian tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah menetapkan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Revisi sesuai yang terdapat dalam Hasil Review Rencana Pembangunan Daerah (RPD) NTB Tahun 2024–2026. RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan lingkup temporal 3 (tiga) tahun. Renstra Sekretariat DPRD NTB merupakan penjabaran dari RPD. Renstra yang disusun Sekretariat DPRD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan, sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 4.2 Cascading Kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran sampai dengan Outcome dan Output Sekretariat DPRD NTB

PEMDA		SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TUJUAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB : " TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF" INDIKATOR : INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF										
ULTIMATE OUTCOME		INTERMEDIATE OUTCOME (ESELON II)		IMMEDIATE OUTCOME (ESELON III)			OUTPUT					
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN SEKRETARIS DPRD	INDIKATOR SEKRETARIS DPRD	SASARAN	INDKATOR ESELON III		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PERAN	OPD
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di NTB	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB**	**SASARAN:** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**INDIKATOR:** Nilai SAKIP Lingkup OPD	**SASARAN 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI:** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	**INDIKATOR:** Nilai SAKIP Lingkup OPD	1 **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Kabag Keuangan**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Renstra, Renja	**Kabag Keuangan**	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Menyusun Dokumen RKA-SKPD	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Menyusun Dokumen DPA-SKPD	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Menyusun Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melakukan Koordinasi dan Penyusunan LKJIP, LKPJ-LPPD, LKPJ dan RKPD	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melakukan Evaluasi Program dan Kegiatan bulanan, triwulan dan semester	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Kabag Keuangan**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Membuat Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Membuat SPT/ SPPD serta SPJ bagi ASN yang melaksanakan tugas	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB

PEMDA	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB					
	TUJUAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB : " TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF"					
	INDIKATOR : INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF					
ULTIMATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME (ESELON II)	IMMEDIATE OUTCOME (ESELON III)	OUTPUT			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melakukan Verifikasi dokumen SPJ Belanja pada SKPD	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Menyusun Dokumen Laporan Keuangan Tahunan SKPD	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Menyiapkan Bahan Pemeriksaan yang dilakukan BPK dan Inspektorat	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**Kabag Umum dan Humas**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melakukan rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melakukan Penatausahaan BMD	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**Kabag Umum dan Humas dan Kabag Keuangan**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Menyiapkan Daftar Hadir dan Absensi Elektronik	Sub Bagian TU	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Menyiapkan Atribut Pakaian Dinas seperti Papan Nama, Lencana Korpri serta Tanda Pengenal Kantor	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Membuat Buku Penjagaan Terkait dengan SKP, Model DK, Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala	Sub Bagian TU	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Bagian TU	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB

PEMDA	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB					
	TUJUAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB : " TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF"					
	INDIKATOR : INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF					
ULTIMATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME (ESELON II)	IMMEDIATE OUTCOME (ESELON III)	OUTPUT			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan Sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan Bimbingan Teknis dalam rangka implementasi peraturan Perundang-undangan	Sub Bagian TU	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Kabag Umum dan Humas**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga DPRD	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meyediakan ATK, Makan Minum Rapat dan Bahan cetak Kantor	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Menyediakan Bahan Bacaan seperti koran, peraturan undang-undang dan buletin	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melakukan fasilitasi tamu	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Melakukan penataan arsip SKPD	Sub Bagian TU	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Melakukan Suport terhadap pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
			Pengadaan Barang Milik Daerah			**Kabag Umum dan Humas**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**

PEMDA	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB				
	TUJUAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB : " TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF"				
	INDIKATOR : INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF				
ULTIMATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME (ESELON II)	IMMEDIATE OUTCOME (ESELON III)	OUTPUT		
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Melakukan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Sepeda motor listrik)	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pengadaan Mebel	Melakukan Pengadaan Alat Penyimpanan Kantor dan Meja Kerja, kursi, lemari	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melakukan Pengadaan Komputer, Printer dan peralatan mesin lainnya	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Melakukan Pengadaan home use	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melakukan Pengadministrasian Surat menyurat	Sub Bagian TU	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menyediakan jasa pelayanan kantor berupa Tenaga Administrasi, Tenaga keamanan dan Tenaga Kebersihan kantor	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah			**Kabag Umum dan Humas**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**

PEMDA	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB						
	TUJUAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB : " TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF"						
	INDIKATOR : INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF						
ULTIMATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME (ESELON II)	IMMEDIATE OUTCOME (ESELON III)	OUTPUT				
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melakukan Pemeliharaan Kendaraan dinas Jabatan	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melakukan Pemeliharaan kendaraan dinas oprasional	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pemeliharaan Mebel	Melakukan pemeliharaan mebel	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melakukan pemeliharaan laptop, pc, printer	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Melaksanakan Pembayaran PBB	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melakukan Pemeliharaan Gedung Sekretariat dan Gedung DPRD	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Sekretariat dan Gedung DPRD	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			**Kabag Keuangan dan Kabag Umum dan Humas**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Membuat Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan DPRD	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Menyediakan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Melaksanakan Medical Check Up DPRD	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
			Layanan Administrasi DPRD			**Kabag Umum dan Humas dan Kabag Persidangan dan**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**

PEMDA	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB											
	TUJUAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB : " TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF"											
	INDIKATOR : INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF											
ULTIMATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME (ESELON II)				IMMEDIATE OUTCOME (ESELON III)			OUTPUT				
												Perundang-undangan	
										Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Memfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Fasilitasi Fraksi DPRD	Memfasilitasi Kegiatan Fraksi DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Memfasilitasi rapat koordinassi dan konsultasi DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Menyediakan kebutuhan rumah tangga DPRD	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
	1	**SASARAN STRATEGIS 1:** MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN LEGISLASI, BUDGETING DAN PENGAWASAN DPRD	**1**	**INDIKATOR:** PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENETAPAN PERATURAN DAERAH	**SASARAN 1 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD:** TERPENUHINYA DUKUNGAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYELENGGARAAN LEGISLASI, BUDGETING DAN PENGAWASAN DPRD		**INDIKATOR:** PERSENTASE PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA	**2**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**			**Kabag Persidangan dan Perundang-undangan**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**
										Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Menyusun program pembentukan perda (propemperda)	Kabag Persidangan dan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB

PEMDA	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB											
	TUJUAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB : " TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF"											
	INDIKATOR : INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF											
ULTIMATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME (ESELON II)				IMMEDIATE OUTCOME (ESELON III)				OUTPUT			
											Perundang-undangan	
										Pembahasan Rancangan Perda	Membahas Rancangan Perda	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Melaksanakan sosialisasi perda	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Memfasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Penyusunan Tata Tertib DPRD	Menyusun dokumen tata tertib DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
			2	**<u>INDIKATOR:</u>** PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PEMBAHASAN ANGGARAN		**2**	**<u>INDIKATOR:</u>** PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PEMBAHASAN ANGGARAN		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**			**Kabag Keuangan**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**
										Pembahasan KUA dan PPAS	Memfasilitasi rapat pembahasan KUA dan PPAS	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	emfasilitasi rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Pembahasan APBD	Memfasilitasi rapat Pembahasan APBD	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Pembahasan Perubahan APBD	Memfasilitasi rapat Pembahasan Perubahan APBD	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB

PEMDA	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB											
	TUJUAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB : " TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF"											
	INDIKATOR : INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF											
ULTIMATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME (ESELON II)				IMMEDIATE OUTCOME (ESELON III)				OUTPUT			
										Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Memfasilitasi rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
			3	**INDIKATOR:** PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DPRD TERHADAP EKSEKUTIF		3	**INDIKATOR:** PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DPRD TERHADAP EKSEKUTIF		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**			**Kabag Persidangan dan Perundang-undangan dan Kabag Keuangan**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**
										Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Memfasilitasi rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
										Pengawasan Penggunaan Anggaran	Memfasilitasi rapat Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kabag Persidangan dan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB

PEMDA		SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB												
		TUJUAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB : " TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF"												
		INDIKATOR : INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF												
ULTIMATE OUTCOME		INTERMEDIATE OUTCOME (ESELON II)			IMMEDIATE OUTCOME (ESELON III)			OUTPUT						
											Perundang-undangan			
											Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Memfasilitasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
		4	**SASARAN STRATEGIS 2:** MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4	**INDIKATOR:** TINGKAT KEPUASAN DPRD ATAS KUALITAS PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	**SASARAN 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD:** MENINGKATNYA DUKUNGAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4	**INDIKATOR:** PERSENTASE DUKUNGAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Kabag Persidangan dan Perundang-undangan dan Kabag Umum dan Humas**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**
											Orientasi DPRD	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
											Pendalaman Tugas DPRD	Workshop/Bimtek DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
											Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Menyediakan kelompok pakar dan tim ahli	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
											Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Menyediakan tenaga ahli fraksi	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
											Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Memfasilitasi Kegiatan Hearing DPRD	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
											Penyusunan Program Kerja DPRD	Menyusun Program Kerja DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
											Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kabag Umum dan Humas	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB

PEMDA	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB								
	TUJUAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB : " TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF"								
	INDIKATOR : INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF								
ULTIMATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME (ESELON II)		IMMEDIATE OUTCOME (ESELON III)		OUTPUT				
	5	**INDIKATOR:** TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT			**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**			**Kabag Persidangan dan Perundang-undangan dan Kabag Keuangan**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**
						Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Menyusun Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kabag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
						Pelaksanaan Reses	Melaksanakan Reses	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
						Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Memfasilitasi kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			**Kabag Persidangan dan Perundang-undangan**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**
						Penyusunan Kode Etik DPRD	Menyusun dokumen kode etik DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
						Pengawasan Kode Etik DPRD	Menyusun dokumen pengawasan kode etik DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
					Fasilitasi Tugas DPRD			**Kabag Persidangan dan Perundang-undangan**	**SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB**
						Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB

PEMDA	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB											
	TUJUAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB : " TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF"											
	INDIKATOR : INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF											
ULTIMATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME (ESELON II)				IMMEDIATE OUTCOME (ESELON III)				OUTPUT			
									Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Menyusun laporan kinerja DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
									Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Memfasilitasi Rapat Badan Musyawarah DPRD	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
									Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Memfasilitasi Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pimpinan serta Penyediaan Tenaga Ahli Pimpinan	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB
									Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2024

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD NTB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam rangka membantu mewujudkan Tujuan dan Sasaran. Strategi yang akan digunakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu dengan meningkatkan standarisasi pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dan fasilitasi koordinasi antara pihak legislative dengan eksekutif.

Strategi yang digunakan Sekretariat DPRD Provinsi NTB selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Arah kebijakan yang akan digunakan yaitu : Optimalisasi Penyediaan Tenaga Ahli, Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur, Meningkatkan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan, Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi yang lengkap, akurat dan andal, Optimalisasi Dukungan dan Layanan Prima, Optimalisasi Fasilitasi Koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif, serta Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan yang Profesional, Baik dan Bersih. Kebijakan yang diambil sebagai arah dalam menentukan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD NTB dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TAHUN 2024-2026				
TUJUAN ke-5	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**			
SASARAN ke-16	**Meningkatnya Kualitas Demokrasi di NTB**			
STRATEGI	**Reformasi Birokrasi Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Fiskal Daerah**			
ARAH KEBIJAKAN	**Pembinaan dan Pengawalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Setiap Perangkat Daerah, Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Reformasi Birokrasi, Digitalisasi Serta Pengembangan Budaya Organisasi**			
RENSTRA SETWAN PROVINSI NTB TAHUN 2025-2029				
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**	
1	*2*	*3*	*4*	
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH			
	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN LEGISLASI, BUDGETING DAN PENGAWASAN DPRD	Penyediaan Tenaga Ahli, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Ketersediaan Data dan Informasi	1	Optimalisasi Penyediaan Tenaga Ahli
			2	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur
			3	Meningkatkan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
			4	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
			5	Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi yang Lengkap, Akurat dan Andal Sebagai Bahan Dalam Pengambilan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	MENINGKATNYA KUALITAS	Memfasilitasi Koordinasi Antara	6	Optimalisasi Dukungan dan Layanan Prima Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

TAHUN 2024-2026				
	PELAYANAN FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pihak Legislatif dengan Eksekutif	7	Optimalisasi Fasilitasi Koordinasi Antara Legislatif dengan Eksekutif
			8	Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan yang Profesional, Baik dan Bersih Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB
			9	Peningkatan Kualitas Layanan Persidangan, Pengembangan Strategi dan Komunikasi Parlemen, Penataan dan Pelatihan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Produk Perundang-Undangan Seperti Naskah Akademik.
			10	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan SDM Aparatur, Penataan Organisasi, Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2024

Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Tenaga Ahli, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Ketersediaan Data dan Informasi.
2. Memfasilitasi Koordinasi Antara Pihak Legislatif dengan Eksekutif.

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penyediaan Tenaga Ahli.
2. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur.
3. Meningkatkan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan.
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan.
5. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi yang Lengkap, Akurat dan Andal Sebagai Bahan Dalam Pengambilan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Optimalisasi Dukungan dan Layanan Prima Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Optimalisasi Fasilitasi Koordinasi Antara Legislatif dengan Eksekutif.
8. Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan yang Profesional,Baik dan Bersih Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
9. Peningkatan Kualitas Layanan Persidangan, Pengembangan Strategi dan Komunikasi Parlemen, Penataan dan Pelatihan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Produk Perundang- Undangan Seperti Naskah Akademik.

10. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan SDM Aparatur, Penataan Organisasi, Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas.

BAB VI
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sehingga Ultimate Gold dapat diwujudkan. Sebagai perwujudan dalam mendukung Prioritas Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah merumuskan dalam bentuk program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai implementasi Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB, secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

6.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan berdasarkan permendagri 90/2019

Rencana Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimastis dan–terpadu pada masing-masing bidang untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, program kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Periode Tahun 2024–2026 dapat dilihat (pada tabel 6.1):

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

i. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
j. Kegiatan Layanan Adminstrasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
   a. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
   b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
   c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
   d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
   e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
   f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
   g. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Tabel 6. 1
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Tujuan: TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF				**INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF**	**INDEKS**		**INDEKS 15,38**	**128.068.436.605**	**INDEKS 28,38**	**118.368.436.605**	**INDEKS 50,38**	**123.468.436.605**	**INDEKS 50,38**	**369.905.309.815**		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			**Nilai SAKIP Lingkup OPD**	**kategori**		**Point BB (75)**	**78.948.221.624**	**Point BB (77)**	**77.527.186.057**	**Point BB (79)**	**80.077.729.778**	**Point BB (79)**	**236.553.137.459**	**Sekretaris DPRD**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Lingkup OPD**	**kategori**		**Point BB (75)**	**78.948.221.624**	**Point BB (77)**	**77.527.186.057**	**Point BB (79)**	**80.077.729.778**	**Point BB (79)**	**236.553.137.459**	**Kabag Keuangan**	
	Meningkatnya Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	**4.02.01.1.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**Dokumen**		**22**	**607.311.900**	**26**	**668.043.090**	**26**	**734.847.399**	**74**	**2.010.202.389**	**Kabag. Keuangan**	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	196.351.200	2	215.986.320	2	237.584.952	5	649.922.472	Kabag. Keuangan	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1	82.371.400	1	90.608.540	1	99.669.394	3	272.649.334	Kabag. Keuangan	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	118.314.400	1	130.145.840	1	143.160.424	3	391.620.664	Kabag. Keuangan	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4.02.01.1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen		1	13.068.300	1	14.375.130	1	15.812.643	3	43.256.073	Kabag. Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	.01 .04		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD												
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	30.284.000	1	33.312.400	1	36.643.640	3	100.240.040	Kabag. Keuangan	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		1	42.391.200	3	46.630.320	3	51.293.352	7	140.314.872	Kabag. Keuangan	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16	124.531.400	17	136.984.540	17	150.682.994	50	412.198.934	Kabag. Keuangan	
	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.02.01.1.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**		**100**	**13.501.030.185**	**100**	**14.272.099.825**	**100**	**15.150.776.429**	**100**	**42.923.906.439**	**Kabag. Keuangan**	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		123	12.740.333.785	123	13.435.333.785	123	14.230.333.785	123	40.406.001.355	Kabag. Keuangan	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1	342.078.100	1	376.285.910	1	413.914.501	3	1.132.278.511	Kabag. Keuangan	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		7500	219.662.700	7500	241.628.970	7500	265.791.867	22500	727.083.537	Kabag. Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	30.208.600	1	33.229.460	1	36.552.406	3	99.990.466	Kabag. Keuangan	
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1	168.747.000	1	185.621.700	1	204.183.870	3	558.552.570	Kabag. Keuangan	
	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	**4.02.01.1.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**Persen**		**100**	**18.475.000**	**100**	**20.322.500**	**100**	**22.354.750**	**100**	**61.152.250**	**Kabag. Umum dan Humas**	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2	2.010.000	2	2.211.000	2	2.432.100	6	6.653.100	Kabag. Umum dan Humas	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		2	7.475.000	2	8.222.500	2	9.044.750	6	24.742.250	Kabag. Umum dan Humas	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	8.990.000	1	9.889.000	1	10.877.900	3	29.756.900	Kabag. Umum dan Humas	
	Meningkatnya Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	**4.02.01.1.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**Dokumen**		**1**	**943.995.900**	**1**	**1.037.095.490**	**1**	**1.139.005.039**	**3**	**3.120.096.429**	**Kabag. Umum dan Humas**	
	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		2	433.746.200	2	477.120.820	2	524.832.902	6	1.435.699.922	Sub Bagian TU	
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1	53.617.500	1	58.979.250	1	64.877.175	3	177.473.925	Kabag. Umum dan Humas	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan	4.02.0	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan	Dokumen		1	189.782.200	1	208.760.420	1	229.636.462	3	628.179.082	Sub Bagian TU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Administrasi Kepegawaian	1.1.05.03	Administrasi Kepegawaian	Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		4	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	12	135.000.000	Sub Bagian TU	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		50	23.000.000	50	23.000.000	50	23.000.000	150	69.000.000	Kabag. Keuangan	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		20	203.850.000	20	224.235.000	20	246.658.500	60	674.743.500	Sub Bagian TU	
	Meningkatnya Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	**4.02.01.1.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**		**100**	**3.451.664.580**	**100**	**3.796.831.038**	**100**	**4.176.514.142**	**100**	**11.425.009.760**	**Kabag. Umum dan Humas**	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	118.460.000	1	130.306.000	1	143.336.600	3	392.102.600	Kabag. Umum dan Humas	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1	337.662.600	1	371.428.860	1	408.571.746	3	1.117.663.206	Kabag. Umum dan Humas	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	228.964.980	1	251.861.478	1	277.047.626	3	757.874.084	Kabag. Umum dan Humas	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	102.788.000	1	113.066.800	1	124.373.480	3	340.228.280	Kabag. Umum dan Humas	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.02.01.1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen		7	173.980.000	7	191.378.000	7	210.515.800	7	575.873.800	Kabag. Umum dan Humas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		.06 .06	Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan												
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1	1.550.000.000	1	1.705.000.000	1	1.875.500.000	3	5.130.500.000	Kabag. Umum dan Humas	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	715.700.000	1	787.270.000	1	865.997.000	3	2.368.967.000	Kabag. Umum dan Humas	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1	149.419.000	1	164.360.900	1	180.796.990	3	494.576.890	Sub Bagian TU	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	74.690.000	1	82.159.000	1	90.374.900	3	247.223.900	Kabag. Umum dan Humas	
	Meningkatnya Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	**4.02.01.1.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah**	**Unit**		**4**	**4.416.893.000**	**4**	**2.200.060.207**	**4**	**2.176.250.030**	**4**	**8.793.203.236**	**Kabag. Umum dan Humas**	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		4	3.062.930.000	2	910.700.907	2	1.001.770.998	8	4.975.401.904	Kabag. Umum dan Humas	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		9	76.575.000	9	84.232.500	9	92.655.750	27	253.463.250	Kabag. Umum dan Humas	
	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	4.02.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	Kabag. Umum dan Humas	
	Tersedianya Mebel	4.02.01.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1	186.000.000	1	204.600.000	1	225.060.000	3	615.660.000	Kabag. Umum dan Humas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		.07 .05														
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		9	1.091.388.000	9	1.000.526.800	9	856.763.282	27	2.948.678.082	Kabag. Umum dan Humas	
	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	4.02.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	Kabag. Umum dan Humas	
	Meningkatnya Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**4.02.01.1.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**		**100**	**6.076.341.360**	**100**	**6.683.975.496**	**100**	**7.352.373.046**	**100**	**20.112.689.902**	**Kabag. Umum dan Humas**	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	20.875.000	1	22.962.500	1	25.258.750	3	69.096.250	Kabag. Keuangan	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	965.089.000	1	1.061.597.900	1	1.167.757.690	3	3.194.444.590	Kabag. Umum dan Humas	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	5.090.377.360	1	5.599.415.096	1	6.159.356.606	3	16.849.149.062	Kabag. Umum dan Humas	
	Meningkatnya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	**4.02.01.1.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Unit**		**6**	**4.676.151.119**	**90**	**2.951.369.300**	**90**	**3.246.506.230**	**186**	**10.874.026.649**	**Kabag. Umum dan Humas**	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit		4	167.600.000	4	184.360.000	4	202.796.000	12	554.756.000	Kabag. Umum dan Humas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.02.1.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit		66	666.160.000	66	732.776.000	66	806.053.600	198	2.204.989.600	Kabag. Umum dan Humas	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	4.02.1.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		6	27.500.000	6	30.250.000	6	33.275.000	18	91.025.000	Kabag. Umum dan Humas	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.02.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		10	417.358.000	10	459.093.800	10	505.003.180	30	1.381.454.980	Kabag. Umum dan Humas	
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.02.1.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	3	115.850.000	Kabag. Umum dan Humas	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.02.1.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		3	3.362.533.119	3	1.506.389.500	3	1.657.028.450	9	6.525.951.069	Kabag. Umum dan Humas	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.02.1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	Kabag. Umum dan Humas	
	Meningkatnya Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	**4.02.1.1.15**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah jenis layanan keuangan DPRD**	**Jenis Layanan**		**3**	**44.309.253.080**	**3**	**44.889.853.080**	**3**	**44.978.513.080**	**3**	**134.177.619.240**	**Kabag. umum dan Humas / Kabag. Keuangan**	
	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	4.02.1.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Orang /Bulan		65	43.503.253.080	65	44.003.253.080	65	44.003.253.080	65	131.509.759.240	Kabag. Keuangan	
	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	4.02.1.1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Paket		2	416.000.000	2	457.600.000	2	503.360.000	6	1.376.960.000	Kabag. Umum dan Humas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		.15 .02														
	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	4.0 2.0 1.1 .15 .03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang		65	390.000.000	65	429.000.000	65	471.900.000	65	1.290.900.000	Kabag. Umum dan Humas	
	Meningkatnya Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	**4.0 2.0 1.1 .16**	**Layanan Adminstrasi DPRD**	**Jumlah jenis layanan administrasi DPRD**	**Jenis Layanan**		**4**	**947.105.500**	**4**	**1.007.536.031**	**4**	**1.100.589.634**	**4**	**3.055.231.165**	**Kabag. umum dan Humas / Kabag. Persidangan dan Perudang-undangan**	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4.0 2.0 1.1 .16 .01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen		1	68.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	218.000.000	Kabag. Persidangan dan Perudang-undangan	
	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	4.0 2.0 1.1 .16 .02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan		1	304.727.100	1	300.719.791	1	330.591.770	3	936.038.661	Kabag. Persidangan dan Perudang-undangan	
	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4.0 2.0 1.1 .16 .03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan		1	154.378.400	1	169.816.240	1	186.797.864	3	510.992.504	Kabag. Persidangan dan Perudang-undangan	
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.0 2.0 1.1 .16 .04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket		3	420.000.000	3	462.000.000	3	508.200.000	9	1.390.200.000	Kabag. Umum dan Humas	
	SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN LEGISLASI, BUDGETING DAN PENGAWASAN DPRD			**INDIKATOR: PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENETAPAN PERDA**	**PERSEN (%)**		**100%**	**49.120.214.981**	**100%**	**40.841.250.548**	**100%**	**43.390.706.827**	**100%**	**133.352.172.356**	**Sekretaris DPRD**	
				PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PEMBAHASAN ANGGARAN	**PERSEN (%)**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Sekretaris DPRD**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
				PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DPRD TERHADAP EKSEKUTIF	**PERSEN (%)**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Sekretaris DPRD**	
	SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			**TINGKAT KEPUASAN DPRD ATAS KUALITAS PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD (kategori)**	**KATEGORI**		**BAIK (76,61-88,30)**		**BAIK (76,61-88,30)**		**BAIK (76,61-88,30)**		**BAIK (76,61-88,30)**		**Sekretaris DPRD**	
				TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT (nilai persepsi)	**NILAI PERSEPSI**		**BAIK (62,51-81,25)**		**BAIK (62,51-81,25)**		**BAIK (62,51-81,25)**		**BAIK (62,51-81,25)**		**Sekretaris DPRD**	
	SASARAN 1 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD : TERPENUHINYA DUKUNGAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYELENGGARAAN LEGISLASI, BUDGETING DAN PENGAWASAN DPRD	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**INDIKATOR:** PERSENTASE PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA	PERSEN (%)		**100**	**49.120.214.981**	**100**	**40.841.250.548**	**100**	**43.390.706.827**	**100**	**133.352.172.356**	**Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan**	
				PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PEMBAHASAN ANGGARAN	PERSEN (%)		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kabag Keuangan**	
				PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DPRD TERHADAP EKSEKUTIF	PERSEN (%)		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan**	
	SASARAN 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD : MENINGKATNYA DUKUNGAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	PERSENTASE DUKUNGAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSEN (%)		**(91% ≤ 100%)**		**(91% ≤ 100%)**		**(91% ≤ 100%)**		**(91% ≤ 100%)**		**Kabag Umum & Humas dan Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	TUGAS DAN FUNGSI DPRD															
	Meningkatnya Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	**4.02.01.01**	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi**	**Perda dan Peraturan DPRD**		**9**	**4.909.930.300**	**9**	**5.095.923.330**	**9**	**5.345.515.663**	**27**	**15.351.369.293**	**Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan**	
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.02.01.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen		6	770.666.800	6	847.733.480	6	932.506.828	18	2.550.907.108	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	4.02.01.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen		12	264.861.500	12	291.347.650	12	320.482.415	36	876.691.565	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	4.02.01.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen		1	3.450.000.000	1	3.500.000.000	1	3.550.000.000	3	10.500.000.000	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4.02.01.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Dokumen		1	301.552.000	1	331.707.200	1	364.877.920	3	998.137.120	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	4.02.01.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Dokumen		1	22.850.000	1	25.135.000	1	27.648.500	3	75.633.500	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	4.02.01.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang		100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	300	350.000.000	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Meningkatnya Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	**4.02.01.02**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran**	**Laporan**		**5**	**1.359.581.000**	**5**	**1.495.539.100**	**5**	**1.645.093.010**	**15**	**4.500.213.110**	**Kabag. Keuangan**	
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	4.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen		1	405.747.500	1	446.322.250	1	490.954.475	3	1.343.024.225	Kabag. Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		.02 .01														
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4.02.0 2.1 .02 .02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen		1	364.984.500	1	401.482.950	1	441.631.245	3	1.208.098.695	Kabag. Keuangan	
	Terlaksananya Pembahasan APBD	4.02.0 2.1 .02 .03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		1	186.777.000	1	205.454.700	1	226.000.170	3	618.231.870	Kabag. Keuangan	
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	4.02.0 2.1 .02 .04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen		1	243.381.000	1	267.719.100	1	294.491.010	3	805.591.110	Kabag. Keuangan	
	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4.02.0 2.1 .02 .06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen		1	158.691.000	1	174.560.100	1	192.016.110	3	525.267.210	Kabag. Keuangan	
	Meningkatnya Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	**4.02.0 2.1 .03**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**Laporan**		**7**	**566.694.400**	**7**	**638.363.840**	**7**	**704.200.224**	**21**	**1.909.258.464**	**Kabag. Persidangan dan Perudang-undangan**	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.02.0 2.1 .03 .01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		1	81.208.400	1	89.329.240	1	98.262.164	3	268.799.804	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4.02.0 2.1 .03 .02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan		1	96.620.100	1	106.282.110	1	116.910.321	3	319.812.531	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.02.0 2.1 .03 .03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan		1	91.625.300	1	100.787.830	1	110.866.613	3	303.279.743	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.02.2.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan		1	73.620.300	1	80.982.330	1	89.080.563	3	243.683.193	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4.02.2.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan		1	73.620.300	1	80.982.330	1	89.080.563	3	243.683.193	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4.02.2.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	Kabag. Keuangan	
	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	4.02.2.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen		1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000	3	420.000.000	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4.02.2.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen		1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	110.000.000	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Meningkatnya Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	**4.02.2.1.04**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas**	**Orang**		**65**	**6.094.588.600**	**65**	**6.704.047.460**	**65**	**7.374.452.206**	**65**	**20.173.088.266**	**Kabag. Persidangan dan Perudang-undangan**	
	Terselenggaranya Orientasi DPRD	4.02.2.1.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen		1	400.000.000	1	440.000.000	1	484.000.000	3	1.324.000.000	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	4.02.2.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen		65	3.242.567.800	65	3.566.824.580	65	3.923.507.038	195	10.732.899.418	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4.02.2.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		100	446.180.000	40	490.798.000	40	539.877.800	180	1.476.855.800	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	4.02.21.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang		9	455.702.400	8	501.272.640	8	551.399.904	25	1.508.374.944	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	4.02.21.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen		1	108.660.000	1	119.526.000	1	131.478.600	3	359.664.600	Kabag. Umum dan Humas	
	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	4.02.21.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen		1	59.977.900	1	65.975.690	1	72.573.259	3	198.526.849	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.02.21.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen		1	1.381.500.500	1	1.519.650.550	1	1.671.615.605	3	4.572.766.655	Kabag. Umum dan Humas	
	Meningkatnya Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	**4.02.21.05**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**	**Laporan**		**3**	**26.432.469.100**	**3**	**16.171.556.505**	**3**	**17.225.678.285**	**9**	**59.829.703.889**	**Kabag. Persidangan dan Perudang-undangan**	
	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	4.02.21.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan		1	8.202.200.000	1	8.202.200.000	1	9.022.420.000	3	25.426.820.000	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	4.02.21.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen		2	308.198.000	2	339.017.800	2	372.919.580	6	1.020.135.380	Kabag. Keuangan	
	Terlaksananya Reses	4.02.21.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen		3	17.822.071.100	3	7.530.338.705	3	7.730.338.705	9	33.082.748.509	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	4.02.21.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang		200	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	400	300.000.000	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Meningkatnya Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	**4.02.21.06**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD**	**Laporan**		**2**	**36.308.300**	**2**	**39.939.130**	**2**	**43.933.043**	**6**	**120.180.473**	**Kabag. Persidangan dan Perudang-undangan**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	4.02.0 2.1 .06 .01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen		1	28.846.400	1	31.731.040	1	34.904.144	3	95.481.584	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	4.02.0 2.1 .06 .02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		1	7.461.900	1	8.208.090	1	9.028.899	3	24.698.889	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Meningkatnya Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	**4.02.0 2.1 .08**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD**	**Jenis Fasilitasi**		**5**	**9.720.643.281**	**5**	**10.695.881.184**	**5**	**11.051.834.396**	**5**	**31.468.358.861**	**Kabag. Persidangan dan Perudang-undangan**	
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.02.0 2.1 .08 .01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen		1	8.713.266.881	1	9.687.872.144	1	9.676.190.403	3	28.077.329.428	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	4.02.0 2.1 .08 .02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Laporan		1	10.675.000	1	11.742.500	1	12.916.750	3	35.334.250	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4.02.0 2.1 .08 .03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen		1	81.832.100	1	90.015.310	1	99.016.841	3	270.864.251	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.02.0 2.1 .08 .04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen		1	706.174.300	1	776.791.730	1	854.470.903	3	2.337.436.933	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4.02.0 2.1 08. 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen		1	208.695.000	1	129.459.499	1	409.239.499	3	747.393.999	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
								128.068.436.605		**118.368.436.605**		**123.468.436.605**		**369.905.309.815**		

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2024

Mutu Pelayanan	A (Sangat Baik)	:	88,31 – 100,00
	B (Baik)	:	76,61 - 88,30
	C (Kurang Baik)	:	65,00 - 76,60
	D (Tidak Baik)	:	25,00 - 64,99

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator yang komprehensif tidak hanya memperhatikan aspek output saja, namun juga memperhatikan faktor-faktor sebelum output didapatkan dan aspek setelah output itu dicapai. Pada sektor publik seperti pemerintah menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat, karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama. Output pada sektor pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah indikator kinerja yang secara langsungmenunjukan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD pada 3 (tiga) tahun yang akan datang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator yang menjelaskan mengenai kinerja utama untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap Lembaga/Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan Indikator Kinerja Utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selamaini. Selain itu, Indikator Kinerja Utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi NTB merumuskan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	FORMULASI PENGUKURAN
			2024	2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	TUJUAN RENSTRA PERIODE 2024-2026 **TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF**						
	INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF		15,38	28,38	50,38	50,38	FORMULASI : RILIS/PUBLISH BADAN PUSAT STATISTIK KETERANGAN DATA: SUMBER INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
	SASARAN STRATEGIS PERTAMA RENSTRA SETWAN NTB PERIODE 2024-2026 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN LEGISLASI, BUDGETING DAN PENGAWASAN DPRD						
1	PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENETAPAN PERATURAN DAERAH (persentase)		100	100	100	100	JUMLAH WAKTU RIEL PENETAPAN PERDA DIBAGI JUMLAH WAKTU NORMAL PENETAPAN PERDA SUMBER DATA: DATA INTERNAL SEKRETARIAT DPRD NTB
2	PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PEMBAHASAN ANGGARAN (persentase)		100	100	100	100	JUMLAH WAKTU RIEL PENYELESAIAN PEMBAHASAN ANGGARAN DIBAGI JUMLAH WAKTU NORMAL PENYELESAIAN PEMBAHASAN ANGGARAN SUMBER DATA: DATA INTERNAL SEKRETARIAT DPRD NTB
3	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DPRD TERHADAP EKSEKUTIF (persentase)		100	100	100	100	JUMLAH REKOMENDASI DIBAGI JUMLAH PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP EKSEKUTIF SUMBER DATA: DATA INTERNAL SEKRETARIAT DPRD NTB
	SASARAN STRATEGIS KEDUA RENSTRA SETWAN NTB PERIODE 2024-2026 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
4	TINGKAT KEPUASAN DPRD ATAS KUALITAS PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB (kategori)		BAIK (76,61-88,30)	BAIK (76,61-88,30)	BAIK (76,61-88,30)	BAIK (76,61-88,30)	KATEGORI YANG DIBERIKAN SEBAGAI HASIL SURVEI TINGKAT KEPUASAN DPRD TERHADAP PELAYANAN YANG DIBERIKAN SEKRETARIAT DRPD. TERDAPAT 4 (EMPAT) KATEGORI PENILAIAN MUTU PELAYANAN: 1. 88,31-100, Kategori Sangat Baik 2. 76,61-88,30, Kategori Baik 3. 65,00-76,60, Kategori Kurang Baik 4. 25,00-64,99, Kategori Tidak Baik SUMBER DATA: KUISIONER
5	TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT (nilai persepsi)		BAIK (62,51-81,25)	BAIK (62,51-81,25)	BAIK (62,51-81,25)	BAIK (62,51-81,25)	NILAI PERSEPSI YANG DIPEROLEH SEBAGAI HASIL SURVEY/KUISIONER PADA MASYARAKAT. TERDAPAT 4 (EMPAT) NILAI PERSEPSI YANG DIBERIKAN PADA PENILAIAN KINERJA: 1. 81,26-100, Persepsi Sangat Baik 2. 62,51-81,25, Persepsi Baik 3. 50,00-62,50, Persepsi Kurang Baik 4. 25,00-49,99, Persepsi Tidak Baik SUMBER DATA: HASIL SURVEY/QUISIONER PADA MASYARAKAT

Sumber: Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024–2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang melengkapi dan memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024–2026.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Rencana Strategis ini memuat program-program dan kegiatan pokok yang bersifat strategis atau memiliki prioritas tinggi untuk mencapai misi pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut secara operasional kedalam Program Kerja Tahunan secara lebih detail sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang telah jabarkan dalam Renja dan RKA disajikan dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Laporan Kinerja (LKjIP) akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Strategis Revisi ini disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan juga sebagai tuntunan untuk menyusun Rencana Kerja dan Program Kerja Tahunan, Lkj-IP dan dokumen perencanaan lainnya dengan mengakomodir saran dan masukan dari berbagai pihak dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas–tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTB selama kurun waktu tahun 2024–2026.

Mataram, 2024
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

DRS. H. SURYA BAHARI, MMPd
NIP. 19680219 198811 1001